

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024
s/d Bulan Maret
BIRO TATA PEMERINTAHAN

Anggaran masih level Sub Kegiatan, belum output tertentu yang mendukung.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
1	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	178.571.250	2,80	2,80	0,00	4.875.900	2,73	4.839.200	2,71	0,02							
1.1	2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	178.571.250	2,80	2,80	0,00	4.875.900	2,73	4.839.200	2,71	0,02							
1.1.1	2.10.11.5.01.0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	178.571.250	2,80	2,80	0,00	4.875.900	2,73	4.839.200	2,71	0,02	Testimoni dari BIG terkait asistensi teknis dan verifikasi batas kalurahan/kelurahan di DIY	https://drive.google.com/file/d/144tCrHMSAbMhVFWq8TIM57AKPvYrCXI/view?usp=drive_link	DIY	BIRO TATA PEMERINTAHAN - Bagian Pemerintahan Umum	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat (DPA SIPD) : 1 Dokumen dari 2 Dokumen 2. Laporan pembinaan serta pengawasan penetapan dan pengesahan batas kalurahan/kelurahan : 1 Laporan dari 1 Laporan 3. Laporan Sinkronisasi Garis Batas Daerah DIY : 0 Laporan dari 1 Laporan	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: A.Pembinaan serta pengawasan penetapan dan pengesahan batas kalurahan/kelurahan -Terusuhnya Laporan Pelaksanaan Pengesahan Batas Kalurahan/Kelurahan tahun 2023 di DIY -Terusuhnya jadwal rencana pelaksanaan kegiatan -Terlaksanakannya rapat persiapan pelaksanaan Pembinaan serta pengawasan penetapan dan pengesahan batas kalurahan/kelurahan -Sampai tahun 2023 progres yang sudah berjalan: 1. Kulon Progo ; Pengesahan batas 22 kalurahan dari 67 kalurahan + 1 kalurahan, Terbit Perbup 17 kalurahan (tanpa rekam BIG) 2. Bantul ; Pemasangan patok 21 kalurahan, terbit perbup 75 kalurahan (tanpa rekam BIG) 3. Gunungkidul ; Pengesahan batas 54 kalurahan dari 144 kalurahan, Terbit rekomendasi BIG 33 kalurahan 4. Sleman ; Pengesahan batas 53 kalurahan dari 86 kalurahan, Terbit Perbup 15 kalurahan (proses supervisi BIG), Raperbup 4 kalurahan dan pemasangan patok pada 63 kalurahan 5. Yogyakarta ; Pengesahan batas 27 kalurahan dari 45 kalurahan, Terbit Perwal 13 kalurahan, Raperwal 14 kalurahan</p> <p>B. Sinkronisasi Garis Batas Daerah DIY -Terusuhnya jadwal rencana pelaksanaan kegiatan -Terlaksanakannya Rapat Koordinasi Batas Daerah antara Kabupaten Sleman DIY dengan Kabupaten Magelang Prov Jateng -Terlaksanakannya Rapat Koordinasi dan Tinjauan Lokasi Pilar Batas Daerah Kabupaten Bantul-Kabupaten Gunungkidul -Terusuhnya Berita Acara Kesepakatan Pemindahan Pilar No PBU.B2 Batas Daerah Kab Gunungkidul-Kab Bantul -Terusuhnya Berita Acara Rapat Koordinasi Pembangunan Pilar Batas Daerah Kab Gunungkidul-Kab Bantul yang berdampak Pembangunan Jalan Baru Paket Kretek-Girijati - Terlaksananya pembangunan pilar PBU B2 Batas Daerah Kab Bantul-Gunungkidul</p> <p>Faktor Penghambat: -Tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: -Kecermatan dalam penyusunan jadwal kegiatan -Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan OPD Tim pengesahan batas Daerah/Desa di DIY</p>	
2	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	136.292.400	6,59	6,59	0,00	8.395.600	6,16	7.677.700	5,63	0,53							
2.1	2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	58.160.200	11,67	11,67	0,00	6.420.600	11,04	6.414.200	11,03	0,01							
2.1.1	2.12.02.1.01.0002	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	28.160.200	22,50	22,50	0,00	5.998.200	21,30	5.998.200	21,30	0,00	Testimoni dari LKSA yang telah terfasilitasi dokumen administrasi kependudukan bagi penduduk rentan adminduk	https://drive.google.com/drive/folders/1FMPCyNRhv2xgmeJ23ap2v1Y9HArsvmzE7usp=sharing	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pendaftaran Penduduk	1. Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi (DPA SIPD) : 5 Dokumen dari 80 Dokumen 2. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (KK, KIA, KTP-EI, Akta Kelahiran) : 6 Dokumen dari 79 Dokumen 3. Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terusuhnya rencana kerja dan jadwal kegiatan pendataan penduduk non permanen dan rentan adminduk tahun 2024; 2. Terlaksanakannya rapat kerja Fasilitasi Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan di DIY pada tanggal 23 Februari 2024 dengan peserta dari Dinas Sosial DIY, LKSA di DIY serta narasumber dari Ketua Forum LKSA DIY dan BPJS Kesehatan Yogyakarta; 3. Terlaksananya rapat koordinasi internal terkait pendataan penduduk non permanen pada bulan Maret 2024;</p> <p>RB Tematik : 1. Telah dilakukan perekaman dan pencetakan KTP-el bagi anak berhadapan dengan hukum (ABH) di BPRSR Dinas Sosial DIY pada bulan Januari; 2. Telah dilakukan rapat kerja Fasilitasi Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan di DIY pada tanggal 23 Februari 2024 dengan peserta dari Dinas Sosial DIY, LKSA di DIY serta narasumber dari Ketua Forum LKSA DIY dan BPJS Kesehatan Yogyakarta;</p> <p>Faktor Penghambat: - tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: - terjalin koordinasi yang baik dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-DIY</p>	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
2.1.2	2.12.02.1.01.0005	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	30.000.000	1,50	1,50	0,00	422.400	1,41	416.000	1,39	0,02	Testimoni dari LKSA yang telah terfasilitasi dokumen administrasi kependudukan bagi penduduk rentan adminduk	https://drive.google.com/drive/folders/1FMPcyNRhv2xgmeI23ap2v1Y9hArsvmzE?usp=sharing	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pendaftaran Penduduk	1. Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun (DPA SIPD) : Dokumen dari 1 Dokumen 2. Dokumen Hasil Kajian Pelaksanaan Kebijakan Adminduk : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersusunnya rencana kerja dan jadwal kegiatan penyusunan kajian terkait administrasi kependudukan; 2. Terlaksananya koordinasi internal terkait penyusunan kajian administrasi kependudukan; Faktor Penghambat: - tidak ada hambatan yang berarti - terdapat sisa belanja alat tulis kantor pada bulan Januari sebesar Rp 6.400,- Faktor Pendukung: - terjalin koordinasi yang baik dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-DIY
2.2	2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	78.132.200	2,81	2,81	0,00	1.975.000	2,53	1.263.500	1,62	0,91						
2.2.1	2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	21.182.200	5,00	5,00	0,00	1.000.000	4,72	311.000	1,47	3,25	Blangko KTP-el dikirim dari Ditjen Dukcapil Kemendagri. Distribusi blangko KTP-el dilakukan oleh Biro Tata Pemerintahan kepada Dinas Dukcapil Kab/Kota.	https://drive.google.com/drive/folders/162xExVqqWJ2y3NkZS3VxdIZDexOTMBHd?usp=sharing	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pendaftaran Penduduk	1. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan 2. Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersusunnya rencana kerja dan jadwal kegiatan fasilitasi terkait pendaftaran penduduk tahun 2024; 2. Terfasilitasi dan terdistribusikannya blangko KTP-el ke Dinas Dukcapil Kab/Kota pada bulan Januari 2024 untuk dukungan Pemilu pada bulan Februari 2024; 3. Terfasilitasinya blangko KTP-el Kab/kota di DIY untuk Pemilu sehingga permohonan KTP-el sebelum dan saat hari H pemilu dapat dilayani tanpa kendala; 4. Terfasilitasinya blangko KTP-el Kab/kota di DIY dari Ditjen Dukcapil saat kunjungan Direjen Dukcapil Kemendagri ke DIY pada bulan Maret 2024; Faktor Penghambat: - terdapat anggaran belanja pengiriman blangko KTP-el yang belum dapat di realisasi karena blangko KTP-el dibawakan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri pada bulan Maret 2024 Faktor Pendukung: - terjalin koordinasi yang baik dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-DIY
2.2.2	2.12.02.1.02.0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	56.950.000	2,00	2,00	0,00	975.000	1,71	952.500	1,67	0,04	Peserta pelayanan IKD merasa terbantu dengan adanya layanan dan inovasi IKD	https://drive.google.com/drive/folders/1Mz6xJo4s3Pa0AbschMp79yJbG7Ng?usp=drive_link	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pendaftaran Penduduk	1. Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan 2. Laporan Hasil Sosialisasi Administrasi Kependudukan : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersusunnya rencana kerja dan jadwal kegiatan sosialisasi terkait administrasi kependudukan tahun 2024; 2. Terlaksananya koordinasi internal terkait sosialisasi administrasi kependudukan; 3. Terlaksananya sosialisasi Identitas Kependudukan Digital pada saat Upacara Hari Jadi ke 269 DIY tanggal 13 Maret 2024 dengan membuka stand layanan IKD di Mandala Krida; Faktor Penghambat: - tidak ada hambatan yang berarti - terdapat sisa belanja alat listrik (baterai) pada bulan Januari sebesar Rp 22.500,- Faktor Pendukung: - koordinasi yang baik dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-DIY
3	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	89.890.600	36,49	36,49	0,00	31.936.400	35,53	31.210.100	34,72	0,81						
3.1	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	35.218.000	66,00	66,00	0,00	22.939.000	65,13	22.367.000	63,51	1,62						
3.1.1	2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	35.218.000	66,00	66,00	0,00	22.939.000	65,13	22.367.000	63,51	1,62	(1) Pihak sekolah dan siswa/ SMA/K merasa terbantu dengan pelaksanaan pelayanan terpadu perekaman KTP-el dan aktivasi IKD di sekolah karena siswa tidak perlu ijin untuk melakukan foto ktp (2) Masyarakat merasa terbantu dengan adanya layanan IKD di dalam event	https://drive.google.com/drive/folders/1JkKuseaYGRybwMH-6pA7F5AMwemRx7B?usp=drive_link	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pencatatan Sipil	1. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan 2. Laporan Kegiatan Pelayanan Terpadu Administrasi Kependudukan : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersusunnya rencana kerja dan jadwal kegiatan pelayanan terpadu pada tahun 2024; 2. Terlaksananya sosialisasi dan jemput bola layanan Identitas Kependudukan Digital pada tanggal 18 Januari 2024 di Kantor Polik Pratama Kota Yogyakarta dan berhasil mengaktifkan 73 akun; 3. Terlaksananya rapat koordinasi pelaksanaan pelayanan terpadu perekaman KTP-el untuk mendukung Pemilu pada bulan Februari 2024; 4. Terlaksananya pelayanan terpadu perekaman KTP-el bagi Wajib KTP Pemula di Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 6 Februari 2024 dan berhasil merekam 627 siswa/ di 3 sekolah (SMK N 2 Pengasih, SMK N 1 Panjatan, dan SMK Maarif 1 Wates); 5. Terlaksananya pelayanan terpadu layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Sleman yaitu di Universitas Amikom Yogyakarta pada tanggal 21 Maret 2024 dan berhasil mengaktifkan 587 IKD; Faktor Penghambat: - Jadwal kegiatan menyosialisasikan kesanggupan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota; - terdapat sisa belanja pengadaan ribbon dan film KTP-el sebesar Rp 272.000 Faktor Pendukung: - terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik antara Biro Tapem DIY dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Kota untuk melakukan pelayanan jemput bola perekaman KTP-el di sekolah dan pendaftaran Identitas Kependudukan Digital
3.2	2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	47.646.600	17,71	17,71	0,00	7.897.400	16,57	7.743.100	16,25	0,32						
3.2.1	2.12.03.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	39.918.300	7,00	7,00	0,00	2.269.400	5,69	2.152.100	5,39	0,30	Peserta Itsbat di Gunungkidul berterimakasih atas	https://drive.google.com/drive/folders/1DtU7x78WN7ldpPhqmw3akG01M_Rx4Eda?usp=drive_link	Semua Kabupaten / Kota,	Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan	1. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersusunnya rencana kerja dan jadwal kegiatan pelaksanaan itsbat nikah pada tahun 2024;

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
												bantuan fasilitasi isbat nikah		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pencatatan Sipil	2. Laporan Hasil Kegiatan Pelayanan Fasilitas Isbat Nikah : Laporan dari 1 Laporan	2. Laksanakan perjalanan dinas ke Kabupaten Gunungkidul dalam rangka koordinasi awal pelaksanaan isbat nikah tahun 2024; 3. Terlaksananya koordinasi internal terkait pelaksanaan isbat nikah tahun 2024; Faktor Penghambat: - Kurangnya kesadaran, ketidaktahuan dan belum pahami masyarakat terkait pengurusan dokumen administrasi kependudukan - Telah dilakukan jemput bola pelayanan adminduk oleh Dinas Dukcapil Kab/Kota namun masih ada masyarakat yang menunda pelaporan peristiwa kependudukannya. - terdapat sisa belanja alat tulis kantor pada bulan Januari sebesar Rp 117.300, Faktor Pendukung: - Terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Dinas Dukcapil Kab/Kota
3.2.2	2.12.03.1.02.0004	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	7.728.300	73,00	73,00	0,00	5.628.000	72,82	5.591.000	72,34	0,48	(1) Stakeholder yang melakukan kerja sama pemberian insentif bagi anak di DIY yang memiliki KIA merasa senang ikut berupaya meningkatkan kepemilikan dokumen adminduk (khususnya KIA) dengan adanya kerja sama ini. Publikasi yang menjadi kewajiban Biro Tata Pemerintahan Setda DIY juga telah dilaksanakan baik melalui media sosial, media cetak maupun elektronik untuk meningkatkan publikasi stakeholder. (2) Testimoni / tanggapan masyarakat dengan adanya kerja sama pemberian insentif KIA	https://drive.google.com/drive/folders/1mRqog5THiXDGg-vs7-mL3i0tbnh5E7usp=drive_link	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pencatatan Sipil	1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil (DPA SIPD) : 1 Dokumen dari 3 Dokumen 2. Dokumen Kerja Sama Pemberian Insentif bagi Pemilik KIA di DIY : 1 Dokumen dari 3 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersusunnya rencana kerja dan jadwal kegiatan terkait kerja sama pemberian insentif pada pemilik KIA di DIY pada tahun 2024; 2. Terinventarisasinya data stakeholders yang masa kerjasamanya akan berakhir pada tahun 2024; 3. Terlaksananya rapat kerja KIA dan penandatanganan perjanjian kerja sama pemberian insentif kepada anak pemegang KIA pada tanggal 26 Februari 2024; 4. Terpublikasikannya insentif kerja sama yang diberikan stakeholder melalui media sosial Biro Tata Pemerintahan, Humas Pemda DIY serta melalui leaflet pada bulan Maret 2024; Faktor Penghambat: - tidak ada hambatan yang berarti - terdapat sisa belanja alat tulis kantor sebesar Rp 18.000 - terdapat sisa belanja kertas dan cover sebesar Rp 19.000 Faktor Pendukung: - Koordinasi yang baik antara mitra kerja sama / stakeholder yang memberikan insentif bagi pemegang KIA di DIY - Terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Dinas Dukcapil Kab/Kota
3.3	2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	7.026.000	16,00	16,00	0,00	1.100.000	15,66	1.100.000	15,66	0,00						
3.3.1	2.12.03.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	7.026.000	16,00	16,00	0,00	1.100.000	15,66	1.100.000	15,66	0,00	(1) Peserta pelayanan IKD merasa terbantu dengan adanya layanan dan inovasi IKD (2) Pihak sekolah dan siswa/ SMA/K merasa terbantu dengan pelaksanaan perekaman KTP-el dan aktivasi IKD di sekolah karena siswa tidak perlu ijin untuk melakukan foto ktp	https://drive.google.com/drive/folders/1JkKuseaYCRybwMH-6pA7FSAMwemRx7B7usp=drive_link	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pencatatan Sipil	1. Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan 2. Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersusunnya rencana kerja dan jadwal kegiatan pembinaan dan pengawasan terkait pencatatan sipil pada tahun 2024; 2. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan ke Dinas Dukcapil pada bulan Januari terkait pencatatan sipil dan kesiapan mendukung Pemilu 2024; 3. Terlaksananya rapat koordinasi persiapan Pemilu 2024 terkait penggunaan Dokumen Biodata Penduduk WNI untuk Pemilu 2024 pada tanggal 13 Februari 2024; 4. Terkumpulkannya laporan kinerja layanan administrasi kependudukan triwulan 1 2024 dari Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota; Faktor Penghambat: - tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: - koordinasi yang baik dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-DIY
4	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	351.737.000	22,30	22,30	0,00	76.392.800	21,72	69.697.200	19,82	1,90						
4.1	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	351.737.000	22,30	22,30	0,00	76.392.800	21,72	69.697.200	19,82	1,90						
4.1.1	2.12.04.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	38.482.200	8,50	8,50	0,00	2.950.000	7,67	2.940.000	7,64	0,03	(1) Pihak sekolah dan siswa/ SMA/K merasa terbantu dengan pelaksanaan pelayanan terpadu perekaman KTP-el dan aktivasi IKD di sekolah karena siswa tidak perlu ijin untuk melakukan foto ktp (2) Masyarakat merasa terbantu dengan	https://drive.google.com/drive/folders/1ehFRH2G80RmS9NbeZ3B0xFG3a_WVhVf7usp=drive_link	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Perawatan Operasional Sistem Informasi Kependudukan dan Penamfaatan Data	1. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan 2. Laporan Hasil Pengembangan Sistem Informasi Kependudukan dan Perawatan Operasional SIAK : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersusunnya rencana kerja dan jadwal kegiatan fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan tahun 2024; 2. Terlaksananya koordinasi internal pelaksanaan fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan pada bulan Februari 2024; 3. Tersedianya data konsolidasi bersih (DKB) semester II tahun 2023 pada bulan Maret 2024; 4. Terlaksananya layanan Identitas Kependudukan Digital pada upacara Hari Jadi ke 269 DIY di Mandala Krida dan memastikan jaringan pelayanan berjalan dengan baik pada bulan Maret 2024; Faktor Penghambat: - tidak ada hambatan yang berarti

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
												adanya layanan IKD di dalam event					- terdapat sisa belanja perawatan operasional SIAK sebesar Rp 10.000,- Faktor Pendukung: - koordinasi yang baik dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-DIY
4.1.2	2.12.04.1.02.0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	313.254.800	24,00	24,00	0,00	73.442.800	23,45	66.757.200	21,31	2,14	Instansi yang melakukan pemohonan pemadanan data merasa sangat terbantu dengan bantuan yang diberikan untuk verifikasi dan validasi data kependudukan.	https://drive.google.com/drive/folders/1m-uZhpq4npTjjsHaABX5qXBg-zLfpq?usp=sharing	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	1. Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan (DPA SIPD) : Dokumen dari 3 Dokumen 2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Data : Laporan dari 1 Laporan 3. Laporan Pelaksanaan Dukungan Pemda terhadap Data Pemilih dan Pemutakhiran Data Pemilih Pengalokasian Tahun 2024 : Laporan dari 1 Laporan 4. Dokumen Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Acara Pemanfaatan Data Kependudukan) : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersusunnya rencana kerja dan jadwal kegiatan pemanfaatan data kependudukan pada tahun 2024; 2. Tersedianya alat rekam KTP-el pengadaan tahun 2024 pada bulan Februari 2024 untuk membantu fasilitasi alat rekam bagi Kabupaten/Kota yang membutuhkan; 3. Terlaksananya rapat kerja pemanfaatan data kependudukan mengundang OPD di Pemda DIY dan Kabupaten/Kota (Dukcapil dan Dinas Kaminfo) secara hybrid pada tanggal 20 Maret 2024 dengan mengangkat materi tentang "Prosedur dan Tata Cara Pemanfaatan Data Kependudukan"; Faktor Penghambat: - terdapat sisa belanja alat tulis kantor pada bulan Februari sebesar Rp 77.600,- - terdapat sisa belanja kertas dan cover pada bulan Februari sebesar Rp 8.000,- - terdapat sisa belanja pengadaan alat rekam pada bulan Februari sebesar Rp 6.600.000,- Faktor Pendukung: - koordinasi yang baik dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-DIY
5	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	69.700.000	1,00	1,00	0,00	467.600	0,67	464.000	0,67	0,00						
5.1	2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	69.700.000	1,00	1,00	0,00	467.600	0,67	464.000	0,67	0,00						
5.1.1	2.12.05.1.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	69.700.000	1,00	1,00	0,00	467.600	0,67	464.000	0,67	0,00	Publikasi buku profil kependudukan melalui website biro tapem	https://drive.google.com/drive/folders/1T3RCx8wWx8ugszQPHu4BnyU5h8Y_eQ?usp=drive_link	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	1. Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun (DPA SIPD) : Dokumen dari 1 Dokumen 2. Dokumen Buku Profil Kependudukan Tahun 2023 : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersusunnya rencana kerja dan jadwal kegiatan penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan pada tahun 2024; 2. Terlaksananya koordinasi internal terkait penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan pada bulan Februari; 3. Tersedianya data konsolidasi bersih (DKB) semester II tahun 2023 dari Ditjen Dukcapil Kemendagri Maret 2024 secara bertahap; Faktor Penghambat: - tidak ada hambatan yang berarti - terdapat sisa belanja alat tulis kantor pada bulan Januari sebesar Rp 3.600,- Faktor Pendukung: - koordinasi yang baik dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-DIY - Tersedianya data konsolidasi bersih (DKB) dari Ditjen Dukcapil Kemendagri Semester II Tahun 2023
6	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	50.000.000	14,13	14,13	0,00	7.058.550	14,12	6.714.050	13,43	0,69						
6.1	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	50.000.000	14,13	14,13	0,00	7.058.550	14,12	6.714.050	13,43	0,69						
6.1.1	2.13.04.1.01.0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	50.000.000	14,13	14,13	0,00	7.058.550	14,12	6.714.050	13,43	0,69	Arahan Kepala Balai PMD Yogyakarta Dalam Rapat Kerja Perencanaan Pembangunan Desa berbasis data dan informasi	https://tinuyuri.com/KabalaPMD	DIY	BIRO TATA PEMERINTAHAN - Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren	1. Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa (DPA SIPD) : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Laporan Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa : 0 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Laporan Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa : 1 Dokumen - Tersusunnya kerangka acuan kerja pelaksanaan pembinaan manajemen pemerintahan desa - Terkoordinasikannya rencana pelaksanaan pembinaan manajemen pemerintahan desa dengan tema perencanaan pembangunan desa - Terlaksananya Rapat Kerja Pembinaan Perencanaan Pembangunan Desa dengan tema "Optimalisasi Perencanaan Pembangunan Desa; Meningkatkan Efektivitas Melalui Pemanfaatan Data dan Teknologi Informasi pada tanggal 22 Februari, menghadirkan narasumber dari Balai Pemerintahan Desa Kiemendagri Wilayah Yogyakarta dan Pakar Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari STPM/AMPM/ dengan sasaran Peserta adalah Perwakilan Pemerintah Kalurahan dari 4 Kabupaten yang memiliki nilai PAD stagnan di Tahun 2023. Faktor Penghambat: - tidak ada hambatan berarti Faktor Pendukung: - Ketersediaan data dari Kabupaten sebagai pendukung pemilahan sasaran peserta - Keaktifan audience dalam penyelenggaraan Rapat Kerja - Kesanggupan waktu dan kesesuaian materi oleh narasumber
7	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	975.551.000	96,00	96,00	0,00	934.882.750	95,83	485.600.000	49,78	46,05						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
7.1	2.22.08.5.01	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	975.551.000	96,00	96,00	0,00	934.882.750	95,83	485.600.000	49,78	46,05							
7.1.1	2.22.08.5.01.0001	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	975.551.000	96,00	96,00	0,00	934.882.750	95,83	485.600.000	49,78	46,05	https://www.instagram.com/reel/C4FruitIgLgU/?igsh=eTNqNjhbXUZOHNz	DIY	BIRO TATA PEMERINTAHAN - Bagian Pemerintahan Umum	1. Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan (DPA SIPD) : Dokumen dari 1 Dokumen 2. Peringatan Hari Bersejarah (Peringatan Hari Jadi DIY) : Event dari 1 Event			<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Rapat Koordinasi Persiapan Peringatan Hari Jadi DIY pada Jumat, 26 Januari 2024 dan Selasa, 13 Februari 2024 yang dipimpin Bapak Sekretaris Daerah DIY di Ruang Rapat Sekretaris Daerah DIY, Komplek Kepatihan. 2. Terlaksananya Rapat Koordinasi Persiapan Peringatan Hari Jadi DIY pada Selasa, 20 Februari 2024 dan Rabu 28 Februari 2024 di Ruang Rapat Bhakti Praja, Lantai 3 Biro Tata Pemerintahan Setda DIY 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi Persiapan Peringatan Hari Jadi DIY pada Kamis 1 Februari 2024 dan Kamis 7 Maret 2024 melalui zoom meeting. 4. Terlaksananya Ziarah dalam rangka Peringatan Hari Jadi ke 269 DIY Tahun 2024 ke Astana Kutahagedhe, Astana Pajimatan Imogiri, dan Astana Girigondo pada tanggal 6 Maret 2024 yang diikuti perwakilan seluruh OPD Pemda DIY 5. Terlaksananya Malam Tirakatan Peringatan Hari Jadi ke 269 DIY Tahun 2024 pada Selasa, 12 Maret 2024 di Bangsal Kepatihan, Komplek Kepatihan 6. Terlaksananya Upacara Peringatan Hari Jadi ke 269 DIY Tahun 2024 pada Rabu, 13 Maret 2024 di Stadion Mandala Krida. <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lomba tema dan design Logo Peringatan Hari Jadi Tahun 2024 tidak dilaksanakan, karena dasar hukum Perda belum ditetapkan. - Penetapan Perda No 2 Tahun 2024 tentang Hari Jadi DIY baru ditetapkan tanggal 8 Maret 2024 - Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2024 belum dapat dicairkan (dari pemerintah pusat), dapat mengajukan pencarian dana dengan SILPA Tahun 2023 namun terbatas hanya untuk prioritas dan Dana Keistimewaan baru cair dipertengahan bulan Maret 2024 - Efisiensi sebanyak 38 Kalurahan tidak melaksanakan acara Malam Tirakatan Peringatan Hari Jadi ke 269 DIY Tahun 2024 - Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp22.750.000 <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan OPD yang terlibat dalam Peringatan Hari Jadi ke 269 DIY Tahun 2024 - Sinergi yang solid antar OPD Pemda DIY dalam menyelesaikan Peringatan Hari Jadi ke 269 Tahun 2024 melalui kegiatan yang di OPD dimasing-masing
8	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	636.757.550	24,32	24,32	0,00	153.476.300	24,10	132.279.457	20,77	3,33							
8.1	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.247.200	42,24	42,24	0,00	13.023.400	41,68	12.313.000	39,41	2,27							
8.1.1	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.247.200	56,90	56,90	0,00	6.280.000	55,84	6.106.600	54,29	1,55	https://drive.google.com/file/d/1B1MIOIuapSheHqUqWeVsgCx1bOly_2v/view?usp=sharing	Kota Yogyakarta	Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DPA SIPD) : 3 Dokumen dari 5 Dokumen 2. Rencana Kerja Biro Tapem Tahun 2025 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Rencana Kerja Perubahan Biro Tapem Tahun 2024 : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 4. Tersusunnya ROPK : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 6. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 : 0 Dokumen dari 1 Dokumen			<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Perjanjian Kinerja Eselon II 2. Penyelesaian Perjanjian Kinerja Eselon II 3. Pengumpulan data dan bahan Renja Tahun 2025 4. Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyempurnaan Renja 2025 5. Penyusunan Ranwal Rencana Kinerja Tahun 2025 6. Penyusunan Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV 7. Penyelesaian Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV 8. Terselesainya penyusunan ROPK keuangan dan fisik subkegiatan 9. Telah dilaksanakan revisi internal terkait Ranwal Rencana Kinerja Tahun 2025 <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu manajemen waktu karena perencanaan di awal tahun bertepatan dengan pembuatan seluruh laporan kegiatan dan kinerja perangkat daerah 2. Timedline perencanaan awal tahun sangat padat, sehingga pengisian aplikasi dan penyusunan dokumen waktunya sangat mepet 3. Terdapat efisiensi belanja ATK karena harga pada Mbiz berada di bawah DPA, total sebesar Rp59.400 <p>Faktor Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi internal yang solid 2. Tanggungjawab pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 3. Keaktifan pegawai berkoordinasi dengan TAPD

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
8.1.2	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.000.000	35,50	35,50	0,00	2.436.400	34,81	2.286.000	32,66	2,15	<p>pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2023. Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.</p> <p>Data nilai SKM pada tahun n belum tersedia maka masih menggunakan data nilai SKM pada tahun n-1. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah istimewa Yogyakarta sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Pelaksanaan pelayanan publik di Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 92,6. Nilai SKM Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2023. Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.</p>	https://drive.google.com/file/d/1BMMIOIUapSheHqUqWsvsGcX1bOly_2v/view?usp=sharing	Kota Yogyakarta	<p>Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha</p>	<p>1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (DPA SIPD) : 2 Dokumen dari 4 Dokumen 2. Rencana Kerja dan Anggaran 2025 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan 2024 : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2025 : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 5. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 2024 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025 sesuai dengan SHBJ 2025 dan ASB 2024 2. Telah dilaksanakan desk pra-RKA oleh internal SKPD dan TAPD 3. Telah tersusun revisi pra-RKA sesuai arahan TAPD 4. Telah diusulkan SHBJ yang belum terakomodir pada aplikasi SIPD Tahun 2025 5. Telah dikirimkan rekomendasi TIK Tahun 2024 berupa software dan hardware melalui aplikasi Peladen 6. Telah tercetak DPA Tahun 2024 dan dalam proses penandatanganan Tim TAPD 7. Telah dilaksanakan desk usulan SHBJ tahun 2025 oleh internal SKPD dan TAPD 8. Telah dilakukan Entry RKKP 2025 pada SIPD 2025 9. Telah melakukan rekap rasionalisasi anggaran tahun 2024 10. Telah dilaksanakan desk rasionalisasi anggaran tahun 2024 oleh internal SKPD dan TAPD 11. DPA Tahun 2024 telah di tandatangani oleh Tim TAPD dan sudah dikirimkan kepada SKPD yang membutuhkan</p> <p>Faktor Penghambat: 1. Perlu manajemen waktu karena perencanaan di awal tahun bertepatan dengan pembuatan seluruh laporan kegiatan dan kinerja perangkat daerah. 2. Aplikasi perencanaan memiliki deadline sangat terbatas dan bersamaan dengan kegiatan perencanaan lainnya. 3. Terdapat sisa belanja ATK sebesar Rp54.400 4. Kondisi Bahan Komputer pada TW I di SKPD masih dalam keadaan prima dan optimal untuk kegiatan mobilisasi di SKPD, sehingga akan diakomodir bulan Juni sebanyak Rp826.000</p> <p>Faktor Pendukung: 1. Koordinasi internal yang solid 2. Tanggungjawab pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 3. Keaktifan pegawai berkoordinasi dengan TAPD</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
8.1.3	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.000.000	33,19	33,19	0,00	4.307.000	33,13	3.920.400	30,16	2,97	Data nilai SKM pada tahun n belum tersedia maka masih menggunakan data nilai SKM pada tahun n-1. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah istimewa Yogyakarta sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Pelaksanaan pelayanan publik di Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 92,6. Nilai SKM Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2023. Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.	https://drive.google.com/file/d/1B8MIMOIUapSheHqUqWeJvsgCx1bOly_2v/view?usp=sharing	Kota Yogyakarta	Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DPA SIPD) : 3 Laporan dari 3 Laporan 2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah : 1 Laporan dari 1 Laporan 3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Urusan Tata Pemerintahan : 1 Laporan dari 1 Laporan 4. Laporan Monitoring dan Evaluasi Tahunan/Bulanan : 1 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pengumpulan bahan dan data penyusunan LKJIP tahun 2023 2. Telah dilaksanakan desk penyusunan LKJIP oleh biro organisasi dan langsung di tindak lanjut dengan penyusunan Revisi LKJIP 2023 dan sudah dikumpulkan selanjutnya masih menunggu Revisi dari Inspektorat 3. Persiapan pembuatan konsep/bahan LKPJ 4. Telah dilaksanakan revisi LKPJ 5. Telah terupload nya hasil LKPJ ke Aplikasi sengguh.jogjaprovo.id 6. Telah diriviewnya LKPJ oleh Bappeda dan sudah ditindaklanjuti dengan revisi LKPJ 7. Terselaksananya LKJIP Tahun 2023 8. Terselaksananya penyusunan LKPJ Tahun 2023 Urusan Tata Pemerintahan Faktor Penghambat: 1. Timeline penyusunan laporan yang waktunya sangat berdekatan menjadikan petugas harus bisa membagi waktu dengan sangat baik 2. Terdapat efisiensi belanja ATK karena harga pada Mbiz berada di bawah DPA, total sebesar Rp74.600 Faktor Pendukung: 1. Koordinasi pegawai yang solid dan tanggungjawab pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 2. Koordinasi cukup intens. 3. Etos kerja yang baik dari seluruh pegawai untuk mendukung terselesaikannya laporan tepat waktu.
8.2	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45.781.000	31,17	31,17	0,00	13.922.400	30,41	11.999.700	26,21	4,20						
8.2.1	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32.400.000	26,00	26,00	0,00	8.100.000	25,00	8.100.000	25,00	0,00	Data nilai SKM pada tahun n belum tersedia maka masih menggunakan data nilai SKM pada tahun n-1. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah istimewa Yogyakarta sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Pelaksanaan pelayanan publik di Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, secara umum mencerminkan tingkat kualitas	https://drive.google.com/file/d/1B8MIMOIUapSheHqUqWeJvsgCx1bOly_2v/view?usp=sharing	Kota Yogyakarta	Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (DPA SIPD) : 3 Dokumen dari 12 Dokumen 2. Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan (SP) setiap bulan : 3 Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pengumpulan bahan 2. pengecekan validitas berkas pertanggungjawaban keuangan seluruh program pada SKPD sampai dengan Bulan Maret 3. Pembayaran Honorarium Tim Penanggungjawab Pengelola Keuangan Triwulan 1 Tahun 2024 Faktor Penghambat: Pengumpulan dokumen mendekati akhir bulan tutup buku Faktor Pendukung: 1. Koordinasi pegawai yang solid dan tanggungjawab pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 2. Koordinasi cukup intens. 3. Etos kerja yang baik dari seluruh pegawai untuk mendukung terselesaikannya laporan tepat waktu.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
												yang Sangat Baik dengan nilai SKM 92,6. Nilai SKM Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2023. Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.					
8.2.2	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.108.800	56,63	56,63	0,00	2.877.000	56,31	1.344.000	26,31	30,00	Data nilai SKM pada tahun n belum tersedia maka masih menggunakan data nilai SKM pada tahun n-1. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah istimewa Yogyakarta sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Pelaksanaan pelayanan publik di Biro Tata Pemerintahan Setda DIY secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 92,6. Nilai SKM Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2023. Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.	https://drive.google.com/file/d/1n2LbAHAW7iQzAFjRoQrC099i0RiPFju/view?usp=sharing	Kota Yogyakarta	Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (DPA SIPD) : 1 Laporan dari 1 Laporan 2. Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Koordinasi petugas akuntansi dengan pengelola BMD biro, serta bendahara SKPD 2. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Bulan Maret Faktor Penghambat: 1. Menu-menu dalam aplikasi SIPD penatausahaan keuangan belum sempurna sehingga pegawai harus membuat laporan keuangan sebagai pendamping 2. Belanja cetak masih menunggu opini BPK terkait Laporan Keuangan Tahun 2023 3. Terdapat belanja yang masuk identifikasi rasionalisasi sebesar Rp900.000 Faktor Pendukung: 1. Koordinasi pegawai yang solid dan tanggungjawab pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 2. Koordinasi cukup intens. 3. Etos kerja yang baik dari seluruh pegawai untuk mendukung terselesainya laporan tepat waktu.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
8.2.3	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	8.272.200	35,70	35,70	0,00	2.945.400	35,61	2.555.700	30,90	4,71	Data nilai SKM pada tahun n belum tersedia maka masih menggunakan data nilai SKM pada tahun n-1. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah istimewa Yogyakarta sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Pelaksanaan pelayanan publik di Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 92,6. Nilai SKM Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2023. Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.	https://drive.google.com/file/d/1n2LbaHAW7i0zAFJR0qC099i0RrPFcju/view?usp=sharing	Kota Yogyakarta	Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (DPA SIPD) : 4 Laporan dari 18 Laporan 2. Laporan Keuangan Bulanan : 3 Laporan dari 12 Laporan 3. Laporan Keuangan Triwulanan : 1 Laporan dari 4 Laporan 4. Laporan Keuangan Semester dan Prognosis : 0 Laporan dari 2 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penatausahaan keuangan sampai dengan Bulan Maret Faktor Penghambat: 1. Beberapa harga rincian belanja berada di bawah standar DPA 2. Terdapat belanja makan dan minum rapat yang masuk identifikasi rasionalisasi tahun 2024 sebanyak Rp600.000 Faktor Pendukung: Etos kerja pegawai yang tinggi sehingga dapat menyelesaikan tugas cepat waktu	
8.3	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.400.000	27,05	27,05	0,00	3.072.000	26,95	3.006.000	26,37	0,58							
8.3.1	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.400.000	27,05	27,05	0,00	3.072.000	26,95	3.006.000	26,37	0,58	Data nilai SKM pada tahun n belum tersedia maka masih menggunakan data nilai SKM pada tahun n-1. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah istimewa Yogyakarta sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Pelaksanaan pelayanan publik di Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, secara umum mencerminkan tingkat kualitas	https://drive.google.com/file/d/1n2LbaHAW7i0zAFJR0qC099i0RrPFcju/view?usp=sharing	Kota Yogyakarta	Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (DPA SIPD) : 0 Laporan dari 2 Laporan 2. Laporan Aset SKPD : 0 Laporan dari 1 Laporan 3. Laporan Persediaan SKPD : 0 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Inventarisasi ulang kondisi Barang Milik Daerah 2. Pembayaran honorarium pengurus barang pada TW 1 Faktor Penghambat: 1. Banyak kondisi barang yang sudah mulai rusak (seperti komputer, laptop, printer, dll) 2. Aplikasi persediaan tahun 2024 belum siap di operasikan 3. Terdapat sisa belanja bahan komputer sebesar Rp66.000 Faktor Pendukung: Dedikasi pegawai untuk tetap menjalankan tugasnya secara efektif dan menyelesaikan tepat waktu	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
8.4	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	363.294.350	20,91	20,91	0,00	75.567.500	20,80	65.596.257	18,06	2,74						
8.4.1	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.282.000	71,13	71,13	0,00	13.552.000	70,28	10.132.000	52,55	17,73	Data nilai SKM pada tahun n belum tersedia maka masih menggunakan data nilai SKM pada tahun n-1. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah istimewa Yogyakarta sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Pelaksanaan pelayanan publik di Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 92,6. Nilai SKM Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2023. Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.	https://drive.google.com/file/d/1n2LbaHAW70zAFJRoQrC09910RrPFcju/view?usp=sharing	Kota Yogyakarta	Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : 1 Paket dari 1 Paket 2. Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor : 1 Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Mengidentifikasi kebutuhan instalasi listrik untuk kelancaran kegiatan SKPD pada bulan maret 2. Penyediaan peralatan listrik untuk memperlancar kinerja pada bulan maret 3. Pengaktifan kembali akun zoom biro untuk mendukung kelancaran kegiatan SKPD Faktor Penghambat: 1. Lampu sering mati, perlu pembaruan jaringan listrik keseluruhan gedung Unit 2. 2. Terdapat sisa belanja langganan zoom sebesar Rp3.200.000 Faktor Pendukung: Kesiap-siagaan pegawai untuk menghadapi permasalahan apabila terjadi gangguan listrik

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
8.4.2	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.423.400	27,00	27,00	0,00	9.530.200	26,90	7.961.500	22,48	4,42	Data nilai SKM pada tahun n belum tersedia maka masih menggunakan data nilai SKM pada tahun n-1. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Pelaksanaan pelayanan publik di Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 92,6. Nilai SKM Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menunjukkan peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2023. Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.	https://drive.google.com/file/d/1n2LbaHAW7i0zAFJR0qC09910RrPFcju/view?usp=sharing	Kota Yogyakarta	Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : 6 Paket dari 6 Paket 2. Penyediaan Pembersih Tangan : 1 Paket dari 1 Paket 3. Tabung Pemadam Kebakaran : 1 Paket dari 1 Paket 4. Alat Tulis Kantor : 1 Paket dari 1 Paket 5. Kertas dan Cover : 1 Paket dari 1 Paket 6. Bahan Komputer : 1 Paket dari 1 Paket 7. Alat Kesehatan : 1 Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Mengidentifikasi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung kelancaran kegiatan pada SKPD pada bulan maret 2. Mengakomodir peralatan dan perlengkapan kantor pada bulan maret untuk mendukung kelancaran kegiatan Faktor Penghambat: 1. Beberapa barang belum tersedia pada Mbizmarket.co.id sehingga pembelian dilakukan secara manual (offline). 2. Terdapat sisa belanja ATK sebesar Rp1.464.200 3. Terdapat belanja yang masuk identifikasi rasionalisasi (Bahan kimia, kertas dan cover, dan perlengkapan dinas) sebesar Rp2.030.000 Faktor Pendukung: 1. Kecepatan pihak penyedia dalam merespon kebutuhan SKPD 2. Etos kerja yang tinggi para pegawai untuk menyelesaikan laporan secara tepat waktu
8.4.3	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.683.000	34,00	34,00	0,00	2.586.000	33,66	699.575	9,11	24,55	Data nilai SKM pada tahun n belum tersedia maka masih menggunakan data nilai SKM pada tahun n-1. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Pelaksanaan pelayanan publik di Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 92,6. Nilai SKM Biro Tata Pemerintahan	https://drive.google.com/file/d/1n2LbaHAW7i0zAFJR0qC09910RrPFcju/view?usp=sharing	Kota Yogyakarta	Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (DPA SIPD) : 1 Paket dari 1 Paket 2. Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih : 1 Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Mengidentifikasi kebutuhan peralatan rumah tangga dan bahan pembersih SKPD pada Bulan Maret 2. Mengakomodir peralatan rumah tangga dan bahan pembersih pada Bulan Maret Faktor Penghambat: 1. Beberapa barang belum tersedia pada Mbizmarket.co.id sehingga pembelian dilakukan secara manual (offline). 2. Terdapat sisa belanja perabot kantor sebesar Rp1.354.635 Faktor Pendukung: 1. Kecepatan rekanan untuk merespon dan mengantarkan barang pesanan 2. Tanggungjawab pegawai menyelesaikan pekerjaan tepat waktu

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
												Setda DIY menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2023. Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.					
8.4.4	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.999.950	24,00	24,00	0,00	6.443.300	23,86	5.103.300	18,90	4,96	Data nilai SKM pada tahun n belum tersedia maka masih menggunakan data nilai SKM pada tahun n-1. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah istimewa Yogyakarta sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Pelaksanaan pelayanan publik di Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 92,6. Nilai SKM Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2023. Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.	https://drive.google.com/file/d/1n2LbaHAW70zAFJRoQrC09910RrPFju/view?usp=sharing	Kota Yogyakarta	Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (DPA SIPD) : 2 Paket dari 2 Paket 2. Bahan Cetak : 1 Paket dari 1 Paket 3. Penggandaan : 1 Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Mengidentifikasi kebutuhan barang cetakan dan penggandaan SKPD pada bulan maret pada bulan maret Faktor Penghambat: 1. Beberapa barang belum tersedia pada Mbizmarket.co.id sehingga pembelian dilakukan secara manual (offline) 2. Terdapat sisa belanja bahan cetak sebesar Rp1.000.000 Faktor Pendukung: 1. Kecepatan rekanan untuk merespon dan mengantarkan barang pesanan 2. Tanggung jawab pegawai menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 3. Koordinasi dan kerjasama antar pegawai yang terjalin baikUntuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
8.4.5	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15.532.000	25,40	25,40	0,00	3.883.000	25,00	3.883.000	25,00	0,00	Data nilai SKM pada tahun n belum tersedia maka masih menggunakan data nilai SKM pada tahun n-1. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah istimewa Yogyakarta sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Pelaksanaan pelayanan publik di Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 92,6. Nilai SKM Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2023. Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.	https://drive.google.com/file/d/1n2LbaHAW7i0zAFJR0QrC09910RrPFcju/view?usp=sharing	Kota Yogyakarta	Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (DPA SIPD) : 2 Dokumen dari 2 Dokumen 2. Bahan bacaan lokal : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Bahan bacaan nasional : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Mengidentifikasi kebutuhan bahan bacaan pada SKPD pada Bulan Maret 2. Menyediakan bahan bacaan surat kabar harian untuk memberikan informasi kepada pegawai untuk menunjang kegiatan SKPD pada Bulan Maret Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: 1. Koordinasi dan kerja sama antarpegawai yang solid 2. Kecepatan penyedia dalam merespon kebutuhan Biro
8.4.6	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	258.374.000	15,35	15,35	0,00	39.573.000	15,32	37.816.882	14,64	0,68	Data nilai SKM pada tahun n belum tersedia maka masih menggunakan data nilai SKM pada tahun n-1. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah istimewa Yogyakarta sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Pelaksanaan pelayanan publik di Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 92,6. Nilai SKM Biro Tata Pemerintahan	https://drive.google.com/file/d/1n2LbaHAW7i0zAFJR0QrC09910RrPFcju/view?usp=sharing	Indonesia	Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DPA SIPD) : 3 Laporan dari 12 Laporan 2. Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi setiap bulan : 3 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah dan luar daerah untuk Bulan Maret Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan yang berarti lainnya Faktor Pendukung: 1. Koordinasi pegawai yang solid dan tanggungjawab pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 2. Koordinasi cukup intens. 3. Etos kerja yang baik dari seluruh pegawai untuk mendukung terselesainya laporan tepat waktu. 4. Pegawai menyelesaikan laporan tepat waktu

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
												Setda DIY menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2023. Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.					
8.5	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.058.000	18,00	18,00	0,00	1.228.000	17,40	1.228.000	17,40	0,00						
8.5.1	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.058.000	18,00	18,00	0,00	1.228.000	17,40	1.228.000	17,40	0,00	Data nilai SKM pada tahun n belum tersedia maka masih menggunakan data nilai SKM pada tahun n-1. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah istimewa Yogyakarta sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Pelaksanaan pelayanan publik di Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 92,6. Nilai SKM Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2023. Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.	https://drive.google.com/file/d/1n2LbAHAW7iQzAFJRQrC099i0RiPFjU/view?usp=sharing	Kota Yogyakarta	Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DPA SIPD) : 1 Laporan dari 1 Laporan 2. Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 1 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Mengidentifikasi kebutuhan materi pada Bulan Maret 2. Mengakomodir kebutuhan materi untuk memenuhi kebutuhan SKPD sampai dengan Bulan Maret Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: Kesadaran pegawai untuk mempergunakan materi sesuai dengan kebutuhan
8.6	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	177.977.000	26,45	26,45	0,00	46.663.000	26,22	38.136.500	21,43	4,79						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
8.6.1	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.240.000	34,00	34,00	0,00	6.665.000	32,93	6.450.000	31,87	1,06	Data nilai SKM pada tahun n belum tersedia maka masih menggunakan data nilai SKM pada tahun n-1. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Pelaksanaan pelayanan publik di Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 92,6. Nilai SKM Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2023. Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.	https://drive.google.com/file/d/1n2LbaHAW70zAFJRoQrC09910RrPFcju/view?usp=sharing	Kota Yogyakarta	Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (DPA SIPD) : 1 Unit dari 1 Unit 2. Kendaraan Dinas Jabatan Kepala Biro Roda 4 : 1 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Mengidentifikasi kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan sd bulan maret 2. Mengakomodir bahan bakar minyak untuk mobilisasi kendaraan dinas jabatan sd bulan maret 3. Perawatan kendaraan dinas Jabatan untuk mendukung kelancaran kegiatan SKPD sampai dengan bulan maret Faktor Penghambat: 1. Terdapat efisiensi belanja bahan bakar karena penyesuaian kebutuhan Biro, total sebesar Rp140.000 Faktor Pendukung: 1. Koordinasi dan kerjasama antarpegawai yang solid 2. Antisipasi pegawai untuk merawat kendaraan
8.6.2	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115.737.000	26,00	26,00	0,00	29.988.000	25,91	24.271.500	20,97	4,94	Data nilai SKM pada tahun n belum tersedia maka masih menggunakan data nilai SKM pada tahun n-1. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Pelaksanaan pelayanan publik di Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM	https://drive.google.com/file/d/1n2LbaHAW70zAFJRoQrC09910RrPFcju/view?usp=sharing	Kota Yogyakarta	Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (DPA SIPD) : 11 Unit dari 11 Unit 2. Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 : 4 Unit dari 4 Unit 3. Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 : 7 Unit dari 7 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Mengidentifikasi kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas operasional sampai dengan Bulan Maret 2. Perawatan kendaraan dinas operasional untuk mendukung kelancaran kegiatan SKPD sampai dengan Bulan Maret 3. Mengakomodir bahan bakar minyak dalam bentuk voucher sampai dengan Bulan Maret Faktor Penghambat: 1. Mobilisasi yang padat mengakibatkan kekurangan kendaraan 2. Tidak ada hambatan berarti lainnya Faktor Pendukung: Kesadaran pegawai untuk menggunakan kendaraan dinas sesuai dengan kegunaannya

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
												92,6. Nilai SKM Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2023. Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.						
8.6.3	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.000.000	24,05	24,05	0,00	10.010.000	23,83	7.415.000	17,65	6,18	Data nilai SKM pada tahun n belum tersedia maka masih menggunakan data nilai SKM pada tahun n-1. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Pelaksanaan pelayanan publik di Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 92,6. Nilai SKM Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2023. Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.	https://drive.google.com/file/d/1n2LbaHAW70zAFJR0qC09910RrPFcju/view?usp=sharing	Kota Yogyakarta	Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (DPA SIPD) : 58 Unit dari 58 Unit 2. Air Conditioner : 22 Unit dari 22 Unit 3. Peralatan dan Mesin Rumah Tangga (Kulkas) : 1 Unit dari 1 Unit 4. Peralatan Komputer (Komputer/Notebook/Laptop dan Printer) : 35 Unit dari 35 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Mengidentifikasi kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin pada SKPD sampai dengan Bulan Maret 2. Pemeliharaan Personal Computer (update software, penambahan memori, dan lain sebagainya) sampai dengan Bulan Maret 3. Pemeliharaan laptop sampai dengan Bulan Maret 4. Pemeliharaan Air Conditioner (isi freon, pembersihan unit AC) sampai dengan Bulan Maret Faktor Penghambat: 1. Gangguan tikus mengakibatkan AC kotor dan berbau 2. Aliran listrik di unit 2 sering mati secara tiba-tiba yang mengakibatkan terhambatnya proses kegiatan pada saat bekerja 3. Kondisi Air Conditioner (AC) pada SKPD masih dalam keadaan prima dan optimal 4. Terdapat belanja yang masuk identifikasi rasionalisasi tahun 2024 sebesar Rp.2.595.000 Faktor Pendukung: 1. Keaktifan pegawai dalam melaporkan kerusakan sehingga dapat ditangani dengan cepat pula 2. Penanganan keluhan yang responsif	
9	4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	634.871.700	40,34	40,34	0,00	252.782.650	39,82	243.284.794	38,32	1,50							

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
9.1	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	337.350.000	3,93	3,93	0,00	12.035.350	3,57	9.476.842	2,81	0,76						
9.1.1	4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	287.350.000	3,55	3,55	0,00	9.382.250	3,27	6.904.542	2,40	0,87	TESTIMONI PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD : KABUPATEN KULON PROGO Sebagai salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tentu akan selalu berinteraksi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di berbagai hal dalam bingkai pelaksanaan pemerintahan daerah. Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kulon Progo sebagai unit yang mengampu tugas dan fungsi terkait kewilayahan, administrasi pemerintahan serta otonomi daerah dalam pelaksanaan kegiatannya tentu juga tidak lepas dari adanya koordinasi dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini dengan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Secara umum pelayanan yang diberikan oleh Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam setiap menanggapi koordinasi dan konsultasi dari Pemerintah Kabupaten (Kulon Progo) kami rasakan cukup baik. Sebagai contoh terhadap Pengusulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo baru-baru ini. Respon cepat serta koordinasi aktif sangat kami rasakan, sehingga tahapan demi tahapan proses dapat berjalan dengan baik dan mendekati selesai tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.	https://bit.ly/testimoni_pemerintahanumum	DIY	BIRO TATA PEMERINTAHAN - Bagian Pemerintahan Umum	1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum (DPA SIPD) : 0 Dokumen dari 5 Dokumen 2. Laporan Monitoring Pilkada Tahun 2024 di DIY : 0 Laporan dari 1 Laporan 3. Laporan Pengangkatan, Pemberhentian dan Pelantikan Pejabat Kepala Daerah : 0 Laporan dari 1 Laporan 4. Laporan Sosialisasi Pilkada Tahun 2024 : 0 Laporan dari 1 Laporan 5. Laporan Peresmian Pengangkatan Anggota dan Pimpinan DPRD Kab/Kota Hasil Pemilu 2024 dan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kab/Kota Masa Jabatan 2019-2024 : 0 Laporan dari 1 Laporan 6. Berkas usulan peresmian anggota dan pimpinan DPRD DIY hasil Pemilu 2024 dan peresmian pemberhentian anggota dan pimpinan DPRD DIY masa jabatan Tahun 2019-2024 kepada Menteri Dalam Negeri. : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: FASILITASI DAN KOORDINASI PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyusunan Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Pilkada Tahun 2024 pada Rabu 3 Januari 2024 di Ruang Rapat Bhakti Praja, Lantai 3, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. FASILITASI DAN KOORDINASI PERESMIAN ANGGOTA/PIMPINAN DPRD DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA/PIMPINAN DPRD. 1. Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo pada Jumat 16 Februari 2024 dan 19 Maret 2024. 2. Penyusunan Konsep Surat Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu anggota DPRD Kab. Kulon Progo dan telah disampaikan ke Biro Hukum melalui Nota Dinas Nomor : 100.1.4.2/799 tanggal 22 Maret 2024 Hal: Peresmian Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Faktor Penghambat: tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: kerjasama yang solid dan Koordinasi yang baik antara OPD dan Kab/Kota
9.1.2	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	50.000.000	6,10	6,10	0,00	2.653.100	5,31	2.572.300	5,14	0,17	Testimoni dari PPKK Fisipol UGM terkait Penyelesaian Pembangunan di wilayah perbatasan	https://drive.google.com/file/d/1RARKH5xJzT4YmxptF706hAucZpxuUw/view?usp=drive_link	DIY	BIRO TATA PEMERINTAHAN - Bagian Pemerintahan Umum	1. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah (DPA SIPD) : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Laporan Penyelesaian Pembangunan di wilayah perbatasan : 0 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: A. Penyelesaian Pembangunan di wilayah perbatasan - Tersusunnya kerangka acuan kerja pelaksanaan Penyelesaian Pembangunan di Wilayah Perbatasan - Terlaksananya Rapat Penyusunan Laporan Pembangunan Wilayah Perbatasan di DIY Tahun 2023 -Terlaksanakannya koordinasi Penyusunan Buku Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan DIY Tahun 2024 Faktor Penghambat: -Tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: -Kerjasama yang solid dan koordinasi yang baik antara OPD Pemda DIY -Terdapat efisiensi makan minum rapat sebesar Rp 375.000 karena rapat dilakukan secara daring
9.2	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	99.999.700	66,10	66,10	0,00	64.961.800	64,96	58.794.416	58,79	6,17						
9.2.1	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	99.999.700	66,10	66,10	0,00	64.961.800	64,96	58.794.416	58,79	6,17	Pemda DIY memperoleh peringkat 2 dengan nilai 96,06% Indikator	https://drive.google.com/drive/folders/1otWBL345GzXZE1NYAwznWnUwZ4CQ	DIY	SEKRETARIAT DAERAH - BIRO TATA PEMERINTAHAN	1. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan (DPA SIPD) : 2 Laporan dari 2 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyusunan LPPD DIY Tahun 2023 : 1. Penyusunan jadwal tahapan penyusunan LPPD Tahun 2023 2. Penyusunan Tim Pelaporan LPPD Tahun 2023

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan		
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi								
												Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (IP SPM) TW 3 Tahun 2023 dan Kategori Provinsi Terbaik Peringkat 1 dengan Nilai 93,74% Kinerja SPM s.d. TW 3 Tahun 2023. Peringkat SPM masih menggunakan hasil evaluasi s.d. TW 3 Tahun 2023, info dari Ditjen Bangsa SPM Award akan dilaksanakan 24 April 2024. Sesuai Kepmendagri No. 100.2.1.7-66/6 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022 DIY memperoleh penghargaan Peringkat 5 (lima) dengan status kinerja tinggi dengan nilai 3,5353.							2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) : 1. Laporan dari 1 Laporan 3. Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) : 1 Laporan dari 1 Laporan 3. Penyampulan penjelasan teknis penyusunan LPPD 4. Pengumpulan Data dan Dokumen Pendukung LPPD Tahun 2023 5. Asistensi Penyusunan LPPD 6. Penyusunan Rancangan LPPD 7. Desk Verifikasi Data dan Dokumen Pendukung LPPD Tahun 2023 8. Reviu Penyusunan LPPD (Rancangan) Tahun 2023 oleh Inspektoral 9. Tindak Lanjut Catatan Hasil Reviu LPPD 2023 10. Input data dan dokumen pendukung dalam aplikasi SILPPD 11. Penyusunan Ringkasan LPPD Tahun 2023 12. Penyerahan dokumen LPPD ke Ditjen Ottda Kemendagri RI Penyusunan Laporan SPM DIY Tahun 2023 : 1. Koordinasi dengan Tim Penerapan SPM DIY 2. Pelaksanaan pembinaan berupa pendampingan dan monitoring penerapan dan pelaporan SPM kepada Perangkat Daerah 3. Pengumpulan data Laporan Penerapan SPM DIY Tahun 2023 4. Sosialisasi Permen PUPR 13 Tahun 2023 tentang SPM Bidang PUPR 5. Penyampaian Laporan SPM DIY Tahun 2023 Faktor Penghambat: LPPD 1. Data dukung IKK LPPD belum rilis, sehingga ada yang masih bersifat sementara 2. Masih terdapat perbedaan persepsi penghitungan capaian kinerja urusan di LPPD 3. Ketidakjelasan beberapa IKK LPPD, antara lain IKK outcome pada urusan pendidikan dan transmigrasi 4. Pemenuhan data kinerja masih ada yang mengabaikan aspek legalitas 5. Terdapat capaian yang belum optimal dikarenakan IKK LPPD belum menjadi target kinerja OPD yang disupport dengan anggaran 6. Serapan tidak sesuai perencanaan Efisiensi anggaran (anggaran Kick Off memakai anggaran Bappeda, at cost perjadin narasumber, ATK, Cetak buku, honor narsum) SPM 1. Terkait inputan e-SPM bangsa pada SPM urusan Kesehatan isian dengan hasil fisik manual belum sama, perlu penyesuaian pemakaian lebih lanjut 2. Pendaftar SPM yang telah dilaksanakan belum dapat menghasilkan data yang lengkap dan valid (BNBA) yang disebabkan pembatasan akses (Kebijakan Siak Terpusat) Faktor Pendukung: LPPD : 1. Koordinasi dan fasilitasi yang baik Tim Penyusun LPPD DIY dalam pelaksanaan kegiatan meliputi: menyiapkan data, kompilasi data, analisis data, penyusunan materi laporan, asistensi Pusat, pelaksanaan reviu, serta penyampaian laporan telah diserahkan sebelum batas waktu ketentuan penyerahan LPPD 2. OPD responsif menyampaikan data dukung meski ada data yang masih bersifat sementara 3. Pelaksanaan asistensi penyusunan LPPD secara kolaboratif dalam rangka penyamaan persepsi 4. Verifikasi secara cermat atas penyampaian data kinerja oleh OPD, untuk yang belum sesuai agar diperbaiki kesesuaiannya berdasarkan definisi operasional SPM : 1. adanya aplikasi e-SPM Kemendagri yang semakin tertata/terupdate memudahkan pelaporan SPM 2. Pendaftar dilaksanakan memperhatikan ketersediaan data di OPD, dilaksanakan konsolidasi data secara rutin dengan mitra kerja.
9.3	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	197.522.000	89,50	89,50	0,00	175.785.500	89,00	175.013.536	88,60	0,40								
9.3.1	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	197.522.000	89,50	89,50	0,00	175.785.500	89,00	175.013.536	88,60	0,40	Dengan adanya kerja sama antara Kementerian Perdagangan RI dengan Bandiklat DIY maka telah bisa dilaksanakan pelatihan yang sangat bermanfaat di bidang perdagangan untuk ASN di Pemda DIY	https://drive.google.com/drive/folders/1mFEiLim4t5CLKZa5pN-VIT9fK9ysj7tg?usp=sharing	DIY	SEKRETARIAT DAERAH - BIRO TATA PEMERINTAHAN	1. Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi (DPA SIPD) : 1 Dokumen dari 2 Dokumen 2. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Kontribusi Asosiasi APPSI dan MPU : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - selasa, 9 Januari 2024 : koordinasi pembahasan rencana kerja sama antara Polda DIY dengan Pemda DIY tentang pengamanan objek vital - Kamis, 11 Januari 2024 : koordinasi pembahasan rencana kerja sama antara Universitas Aisyiyah Yogyakarta dan Pemda DIY tentang pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi - rabu, 17 Januari 2024 : koordinasi pembahasan rencana kerja sama antara Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kementerian Kelautan RI dengan Pemda DIY - rabu, 31 Januari 2024 : pembahasan rencana kerja sama antara Poltekes Kemenkes Yogyakarta dan Pemda DIY - selasa, 20 Februari 2024 : evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama - Jumat, 23 Februari 2024 : telah dilakukan iuran kontribusi asosiasi APPSI dan MPU - rabu, 6 Maret 2024 : pembahasan rencana kerja sama antara Pemda DIY dengan Perguruan Tinggi - Jumat, 15 Maret 2024 : pembahasan rencana kerja sama antara Pemkab Subang dengan Pemda DIY - selasa, 19 Maret 2024 : pembahasan rencana kerja sama antara Pemprov Kaltim dengan Pemda DIY Faktor Penghambat: - banyak anggota Tim TKKSD yang berganti, jadi perlu		

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
10	4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	1.265.000.000	10,36	10,36	0,00	131.010.500	10,36	100.103.350	7,91	2,45						penyesuaian dan belajar lagi tentang dasar hukum apa saja yang digunakan Penda DIY dalam melaksanakan penyusunan naskah kerja sama Faktor Pendukung: - dengan adanya zoom, sekarang lebih cepat dalam pengkoordinasian proses penyusunan naskah kerja sama
10.1	4.01.10.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	1.265.000.000	10,36	10,36	0,00	131.010.500	10,36	100.103.350	7,91	2,45						
10.1.1	4.01.10.5.01.0010	Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	1.265.000.000	10,36	10,36	0,00	131.010.500	10,36	100.103.350	7,91	2,45	Perwakilan Padukuhan Lengkong Kalurahan Sambirejo terkait Perubahan Pasca Penerapan Desa menjadi Kalurahan	https://tinyurl.com/testimonikalurahansambirejo	DIY	BIRO TATA PEMERINTAHAN - Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah Dokumen Penerapan keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Dibina (DPA SIPD) : 1 Dokumen dari 7 Dokumen Fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RB Kalurahan pada 4 Kabupaten : 0 Laporan dari 1 Laporan Profil kalurahan lengkap : 0 Kalurahan dari 392 Kalurahan Koordinasi penyusunan pedoman SAKIP Kalurahan : 0 Rancangan Produk Hukum dari 4 Rancangan Produk Hukum Fitur E-SAKIP dan Reformasi Kalurahan pada Sistem Informasi Kalurahan : 0 Fitur dari 2 Fitur Sosialisasi Penguatan Peran Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan : 4 Kali dari 14 Kali Laporan hasil koordinasi, pemantauan dan evaluasi penerapan keistimewaan kapanewon/kemantren dan kalurahan/kelurahan : 0 Laporan dari 1 Laporan 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kalurahan pada 4 Kabupaten: 1 Laporan* - Tersusunnya rencana kerja kegiatan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi kalurahan -Terakumpulnya data dan bahan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi kalurahan -Tersusunnya dokumen kontrak kerja dengan tenaga ahli pendamping reformasi birokrasi kalurahan -Tersusunnya hasil koordinasi progres pembentukan Tim Reformasi Kalurahan Kabupaten dengan hasil: Sleman, Kulon Progo dan Gunungkidul sudah terbentuk susunan timnya dan proses penetapan Perbup. Kabupaten Bantul dalam proses penetapan Tim. -Tersusunnya rancangan indikator "assessment" kapanewon sebagai evaluator pelaksanaan penerapan reformasi birokrasi kalurahan. - Terlaksananya koordinasi kelompok kerja reformasi birokrasi kalurahan Penda DIY dan Per Kabupaten di DIY melalui rapat koordinasi pada tanggal 26 Maret dengan hasil bahwa tindaklanjut terkait pembentukan tim di keempat Kabupaten sebagai berikut; <ol style="list-style-type: none"> Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 471/2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Kalurahan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang ditetapkan pada 27 Desember 2023 Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 53/KPTS/TIM/2024 tentang Reformasi Kalurahan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang ditetapkan pada tanggal 1 Februari 2024 Surat keputusan Bupati Sleman Nomor 12/Kep.DH/A/2024 tentang Tim Reformasi Kalurahan Pemerintah Kabupaten Sleman yang ditetapkan pada 31 Januari 2024 Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Reformasi Kalurahan Pemerintah Kabupaten Bantul yang ditetapkan pada 6 Maret 2024 *Sosialisasi Penguatan Peran Pemerintah Kalurahan/Kelurahan: 14 Kali -Tersusunnya Kerangka Acuan Kerja Persiapan Pelaksanaan Sosialisasi Penguatan Peran Pemerintah Kalurahan/Kelurahan -Terkoordinasikannya rencana pelaksanaan sosialisasi penguatan peran pemerintahan kalurahan dengan tema pentingnya penguatan peran pemerintah kalurahan melalui optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan kalurahan, serta Penguatan Peran Pemerintah Kalurahan dengan tema Kalurahan Responsif dan Inklusif. - Terlaksananya Sosialisasi Penguatan Peran Pemerintah Kalurahan/ Kelurahan yang merupakan kegiatan kolaborasi dengan legislatif dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> pada tanggal 5 Februari dengan sasaran Kelurahan Baciro, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta bertempat di Ruang Abimanyu 2, Graze Yogyakarta melibatkan narasumber Perwakilan Legislatif dan Akademisi Univeritas Muhammadiyah Yogyakarta pada tanggal 5 Februari dengan sasaran Perwakilan Dukuh Se-Kapanewon Semin bertempat di Ruang Pertemuan Utama Balai Kalurahan Bendung, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul, melibatkan narasumber Perwakilan Legislatif dan Balai Pemerintahan Desa Yogyakarta pada tanggal 7 Februari dengan sasaran Kelurahan Sorosutan, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta bertempat di Ruang Abimanyu 2, Graze Yogyakarta, melibatkan narasumber Perwakilan Legislatif dan Akademisi Univeritas Muhammadiyah Yogyakarta pada tanggal 7 Februari dengan sasaran Kelurahan Wirogunan, Kemantren Mergansan, Kota Yogyakarta bertempat di Ruang Abimanyu 3, Graze Yogyakarta, melibatkan narasumber Perwakilan Legislatif dan Akademisi Univeritas Muhammadiyah Yogyakarta <p>*Laporan Hasil Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Keistimewaan Kapanewon / Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan: 1 Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya koordinasi lintas sektor dalam penyusunan laporan hasil koordinasi, pemantauan dan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
																		<p>evaluasi penerapan keistimewaan kapanewon / kemantren dan kalurahan / kelurahan pada tanggal 14 Maret dengan hasil rencana pelaksanaan rapat kerja forum komunikasi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan dengan tema "Jagongan Kalurahan" melibatkan unsur aparat pemerintah kalurahan, paguyuban Lurah dan Pamong serta masyarakat</p> <p>- Terlaksananya forum komunikasi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan / kelurahan dan kapanewon / kemantren sebanyak 4 kali dengan jadwal sebagai berikut;</p> <p>1) Raker Forum Komunikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan di Kalurahan Purwosari, Kapanewon Girmulyo, Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 24 Februari 2024</p> <p>2) Raker Forum Komunikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan di Kalurahan Bendung, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 16 Maret 2024</p> <p>3) Raker Forum Komunikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan di Kalurahan Ngampilan, Kemantren Ngampilan, Kota Yogyakarta pada tanggal 19 Maret 2024</p> <p>4) Raker Forum Komunikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan di Kalurahan Tanjungharjo, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 23 Maret 2024</p> <p>Faktor Penghambat: Efisiensi pada beberapa belanja yaitu: -Sewa tempat pelaksanaan Sosialisasi Penguatan Peran Pemka/Kel: 1.500.000 -Honorarium Narasumber Raker Forkom Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren:2.800.000 -Honorarium Narasumber Sosialisasi Penguatan Peran Pemerintahan Kalurahan / Kelurahan: 400.000 -Penyusunan harga ATK dan Kertas Cover di Mbizmarket;</p> <p>Faktor Pendukung: - Dukungan Pemerintah Kabupaten dalam tindaklanjut Pergub Reformasi Kalurahan terkait pembentukan tim - Kehadiran peserta dan keaktifan dalam pelaksanaan sosialisasi - Kesiapan waktu dan penyampaian materi yang selaras dengan tema KAK oleh narasumber - Partisipasi aktif masyarakat dalam rapat kerja forum komunikasi "Jagongan Kalurahan"</p>
Jumlah			4.388.371.500	36,72	36,72		1.601.279.050	36,49	1.081.869.851	24,65								